

Kedudukan wali hakim dalam perkawinan anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 / Wenny Widyastuti

Wenny Widyastuti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20270203&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam suatu perkawinan kehadiran seorang wali bagi calon pengantin perempuan keberadaannya adalah mutlak. Apabila dalam suatu perkawinan tidak dihadiri oleh wali bagi anak perempuan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan nerkawinannya menjadi tidak sah baik berdasarkan Hukum Islam maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Posisi ayah biologis bagi seorang Anak Luar Kawin yang merupakan calon pengantin perempuan akan digantikan oleh Wali Hakim yang ditunjuk oleh menteri yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut kemudian akan dilangsungkan S t a r k ^ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tertang. Wali Hakim Ayah biologis dari seorang Anak Luar Kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan anaknya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal tersebut berdasarkan Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur an dan al-Hadits Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentans Perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kenustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan cara menganalisa bahanbahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-vmdangan serta ketentuanketentuan lain yang mengatur atau berkaitan dengan Wali Hakim dan penelitian dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penulisan tesis ini Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (library research) dan untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan wawancara. Setelah dilakukan penelitian mengenai status anak di luar kawin menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa Anak Luar Kawin tidak ada hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologisnya, untuk itu yang menjadi wali dalam Perkawinan Anak Luar Kawin adalah Wali Hakim karena anak luar kawin tidak mempunyai Wali Nasab.

<hr>

ABSTRACT

Based on Islamic law, that is an obligation for the presence of a proxy in the marriage of women. Based on the Islamic Law, The Compilation of Islamic Law, and also Act No. I Year 1974 about Marriage, if the women's proxy is absence in the marriage process that makes the marriage become illegal. The authority of the biological father of illegal children as a bride will be replace by the Proxy, whose pointed by Ministry

of religion is the Head of the local regional religion affair office. Thus the marriage will be held based in the Regulation of Ministry of religion No. 30 year 2005 about Proxy. The biological father of illegal children does not have “nasab” relation with her daughter, the daughter only has civil case relation with her mother, and this is based on the Koran, hadist, the Compilation of Islamic Law, and also Act No 1 Year 1974 about marriage. This research conduct by literacy research which is analyze primary law sources such as regulation and any other decree that related with the authority of the proxy in the marriage of illegal children, and this research also conduct by analyze the second law sources that related with the topics of this thesis. The normative law research which is also named literacy research which is to make a comprehensive research this research also conduct interview with resources persons. This research conclude that the status of illegal children based on the Islamic Law and the regulation is that illegal children have no “nasab” relation with her biological father, this make no right and obligation relation between daughter and her biological father, therefore the one who has authority in the marriage of illegal children is the Proxy because illegal children have no “nasab” relation.